

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA DI DESA PAKKAT HAUAGONG,
KECAMATAN PAKKAT, KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

AFTI ANJU TRIBINTANG SINURAT

178510015



**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Pakkat, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara”

Nama Mahasiswa : Afi Anju Tribintang Sinurat

NPM : 178510015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing



Dr. Beby Masitho Batubara, S.sos, MAP
Pembimbing I

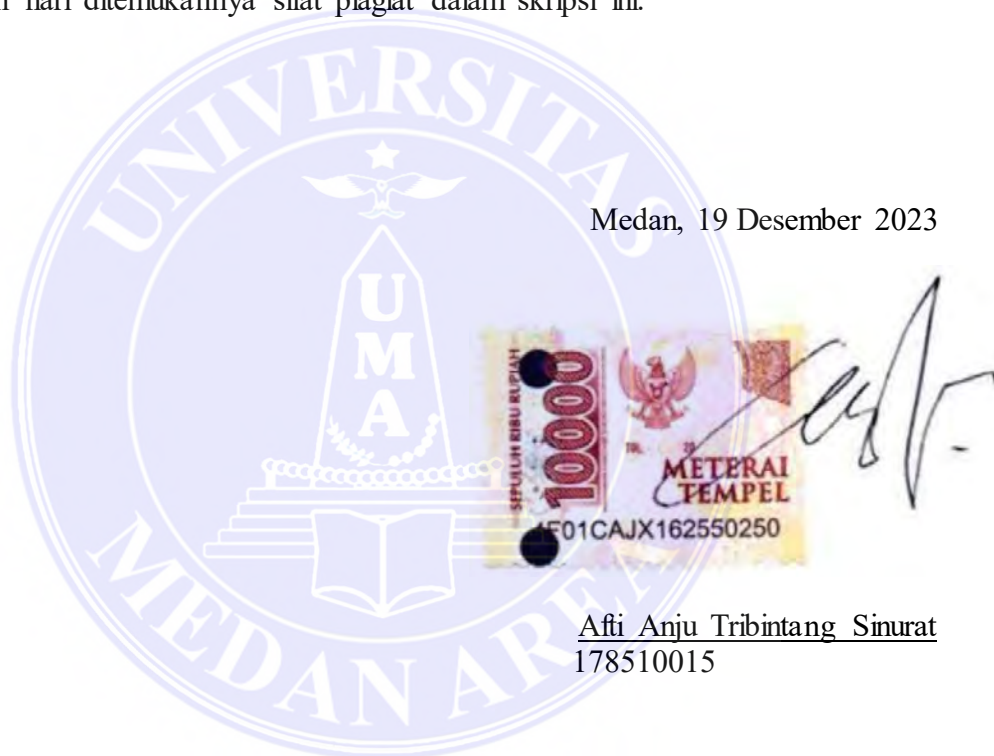
Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP
Pembimbing II



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini yang dikutip dari hasil karya orang lain sudah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma dan aturan penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukannya sifat plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 Desember 2023



Afi Anju Tribintang Sinurat
178510015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afi Anju Tribintang Sinurat

NPM : 178510015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA PAKKAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA”. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area dapat menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi tugas akhir / skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Januari 2023

Yang Menyatakan,



Afi Anju Tribintang Sinurat
178510015

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan layak huni masih jauh dari yang harapan di Desa Pakkat Hauagong, Kec. Pakkat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan solusi yang diterapkan guna menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan perumahan yang layak huni di Di Desa Pakkat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah, yang merupakan sejumlah bantuan yang diberikan untuk orang-orang berpenghasilan rendah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yakni terdiri dari 6 (enam) aspek: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar-organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Dalam mengumpulkan data penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik penggumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan informan sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan perumahan yang layak huni di Desa Pakkat belum berjalan optimal.

Kata Kunci: Implementasi, BSPS, Pakkat, Hauagong

ABSTRACT

Fulfilling the need for a healthy and livable place to live is still far from what was expected in Pakkat Hauagong Village, Pakkat sub district for people with low incomes. The theory used in this study is implementation theory according van meter dan van horn, consists of six. In collecting research data using qualitative research methods with data collection techniques of interviews, observation, and documentation by using informants as a source of information. The results of this study indicate that the implementation of the self-help housing stimulant assistance program in the provision of livable housing in Pakkat Village has not run optimally.

Keyword: *Implementation, BSPS, Pakkat, Hauagong*



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Afi Anju Tribintang Sinurat yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Lahir pada tanggal 02 Agustus 1999, berusia 23 tahun dari pasangan Bapak Affandi Sinurat dan Ibu Tiodor Sitanggung. Penulis merupakan seorang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area pada tahun 2017. Pernah tergabung dalam Organisasi external Kampus yaitu HIMAPA (HIMPUNAN MAHASISWA PAKKAT) menjabat sebagai ketua umum pada tahun 2020-2021

Penulis pertama kali masuk pendidikan dasar di SD 2 Negeri Pakkat. 173463 Pada tahun 2005 sampai 2011 dan melanjutkan sekolah tinggi pertama SMP Negeri 1 Pakkat pada tahun 2011-2014 dan penulis melanjutkan sekolah Menengah Atas SMA N 1 Pakkat pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan pendidikan di UNIVERSITAS MEDAN AREA pada tahun 2017-2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dan saya mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada orangtua saya yang telah memberikan sepenuhnya kepada saya, serta kepada diri sendiri yang telah bertahan dalam penyusunan skripsi dan kepada teman-teman yang seorganisasi yang telah menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DISA PAKKAT, KECAMATAN PAKKAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA”.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Medan Area jurusan Ilmu Pemerintahan. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M,Eng. M,sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Ibu Dr Beby Masitho Batubara, S.sos, MAP selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP Selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Ibu Riri Rezeki S,Sos,MAP Selaku Sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Affandi Sinurat yang penulis yakini melihat perjuangan dan membantu penulis dan Ibunda Tiodor Sitanggung yang telah banyak berjuang dan memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.
9. Kepada kakak-kakak kandung penulis yang telah banyak membantu, berjuang, serta memberikan dukungan penuh kepada penulis
10. Kepada adik bungsu saya Anisa Sinurat yang selalu menyemangati penulis menyelesaikan skripsi penulis.
11. Seluruh teman-teman stambuk 2017 Prodi ilmu Pemerintahan, Maya, Ulfa, Umy, Zizah, Bunge, Dosma, Ayu, Atin, Dewi, Isak, Berry, Ariel, Andrison, Pane, Bowo, Risky, dan banyak lagi yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih 4 tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.
12. Seluruh teman sejawat yang berhimpun dalam berorganisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Pakkat (HIMAPA) yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan ini.

13. Seluruh teman-teman fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

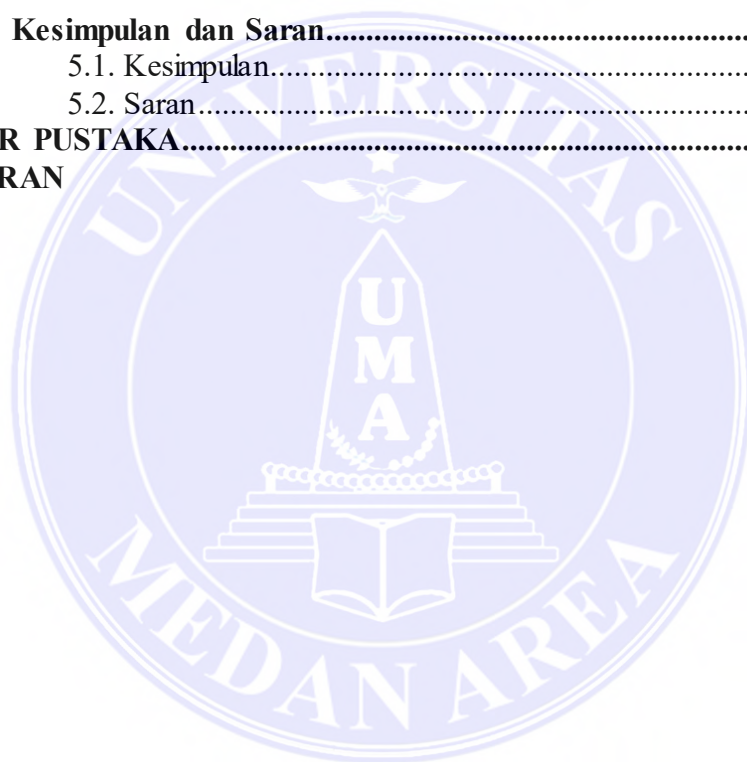
14. . Rekan-rekan se-almamater.



DAFTAR ISI

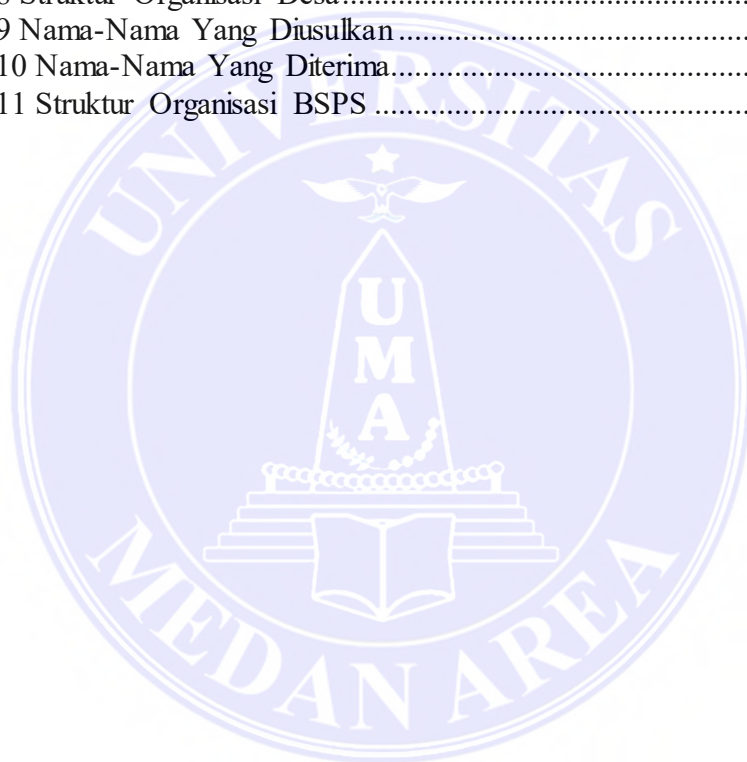
ABSTRAK	
ABSTRACT	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kebijakan Publik.....	7
2.2. Implementasi Kebijakan.....	9
2.3. Implementasi Kebijakan.....	11
A. Model Van Mater dan Van Horn.....	12
B. Model Merilee S Grindle.....	17
2.4. Kebijakan Pembangunan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Renda.....	20
2.5. Perumahan Layak Huni.....	25
2.6. Keswadayaan Masyarakat.....	26
2.7. Desa.....	29
2.8. Penelitian Terdahulu.....	31
2.9. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4. Informan Penelitian.....	37
3.5. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Hasil.....	39
4.1.1. Gambaran umum desa Pakkat.....	39
4.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	39
4.1.3. Sarana dan Prasarana.....	40
4.1.4. Perkebunan.....	41
4.1.5. Jumlah Penduduk.....	42

4.1.6. Agama dan Etnis	42
4.1.7. Visi dan Misi.....	42
4.1.8. Data Kemiskinan Penduduk.....	43
4.1.9. Struktur Organisasi.....	44
4.1.10. Daftar Nama Yang Menerima Bantuan.....	37
4.2. Pembahasan.....	46
4.2.1. Implementasi Kebijakan Pemerintah	46
4.2.2. Sumber Daya Manusia Dalam Penetapan BSPS....	48
4.2.3. Hubungan Antar Organisasi.....	50
4.2.4. Karakteristik Agen Pelaksana	53
4.2.5. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik	56
4.2.6 Disposisi Implementor	58
4.3. Faktor Penghambat dan Pendukung	60
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka pemikiran.....	33
Tabel 1.2 Waktu penelitian.....	35
Tabel 1.3 Luas wilayah.....	40
Table 1.4 Sarana dan Prasarana.....	41
Tabel 1.5 Perkebunan.....	41
Tabel 1.6 Agama.....	41
Tabel 1.7 Data Kemiskinan.....	41
Tabel 1.8 Struktur Organisasi Desa.....	44
Tabel 1.9 Nama-Nama Yang Diusulkan.....	44
Tabel 1.10 Nama-Nama Yang Diterima.....	48
Tabel 1.11 Struktur Organisasi BPS.....	53



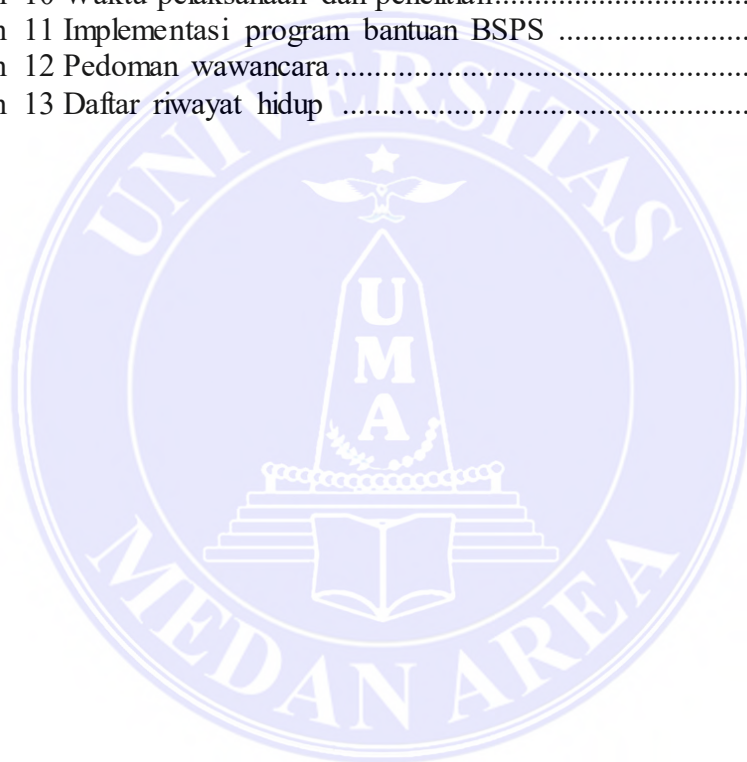
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Implementasi kebijakan van mater dan van hor	17
Gambar 1.2. Implementasi kebijakan grindle.....	19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto kantor kepala desa	69
Lampiran 2 Foto bersama kepala desa pakkat hauagong.....	69
Lampiran 3 Foto bersama sekretaris desa	70
Lampiran 4 Foto bersama perangkat desa.....	70
Lampiran 5 Foto bersama penanggung jawab bantuan.....	71
Lampiran 6 Foto bersama masyarakat yang menerima bantuan.....	71
Lampiran 7 Foto rumah bantuan yang telah selesai	72
Lampiran 8 Hasil observasi penelitian data nama-nama penerima yang di usulkan BSPS.....	74
Lampiran 9 Lembar Observasi penelitian data penerima BSPS	75
Lampiran 10 Waktu pelaksanaan dan penelitian.....	76
Lampiran 11 Implementasi program bantuan BSPS	77
Lampiran 12 Pedoman wawancara	78
Lampiran 13 Daftar riwayat hidup	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Pada hakikatnya fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia memang sangat vital. Tanpa tempat tinggal, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Terpenuhinya kebutuhan akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup. Ada peringkat dalam pemenuhan atas kebutuhan itu, dari kebutuhan yang minimum hingga yang tidak terbatas

Indonesia merupakan suatu bangsa yang sedang berkembang dan giat-giatnya mengejar ketertinggalan disegala bidang. Salah satu upaya yang dilakukan salah satunya dibagian infrastruktur, yang dimana bertujuan agar supaya masyarakat merasakan hidup yang sejahtera dan mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat atau penduduk yang ada di suatu wilayah. Kesejahteraan tidak hanya bisa dilihat dari sisi ekonomi masyarakat akan tetapi harus di lihat juga dari sisi kesejahteraan rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Pendapat yang dikemukakan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti Implementasi yaitu “kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan

(policy output) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M/2016 Tentang bantuan program bedah rumah, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Namun rendahnya kualitas hidup masyarakat khususnya di bidang perumahan dan permukiman kumuh telah menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki aksesprasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang juga mempunyai peran yang sangat strategis (Panudju, 2009:70).

Namun, Turner (1976) menunjukkan bahwa di perumahan bagian paling dasar dari lingkungan sehari-hari telah lari dari masyarakat. Ia mengemukakan bahwa kegagalan proyek pemukiman terutama dunia ketiga, bermula dari kesalahan cara pandang perencana dalam menilai kesesuaian lingkungan permukiman. Perencana atau perancang biasa menilai perumahan sebagai produk, bukan sebagai proses.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan Pendataan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, masih ada 3,4 juta rumah tidak layak huni saat ini. Keadaannya rusak ringan hingga berat. Untuk daerah-daerah di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni sebarannya merata. Dalam menentukan prioritas tentang rumah, seseorang atau sebuah keluarga yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat memberikan kesempatan kerja. Ketidak layak hunian merupakan penjelmaan dari dampak yang diakibatkan dari faktor kemiskinan. Disamping hal tersebut diatas ketidak layak hunian juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, dan pendapatan rendah (Panudju, 2009:9)

Program Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah dengan melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS yakni bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kegiatan ini dilaksanakan pada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Kecamatan Pakkat, Desa Pakkat Hauagong telah menjalankan Program BSPS tersebut guna meningkatkan kualitas rumah layak huni. Kecamatan Pakkat, Desa Pakkat Hauagong adalah salah satu Kecamatan di Sumatera Utara yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BSPS). Saat ini dalam periode 2022 sudah banyak masyarakat yang sudah merasakan program ini. Program BSPS ini dilaksanakan mulai tahun 2018 melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa akan mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan yang selanjutnya akan dikumpulkan di kantor desa dan selanjutnya akan diusulkan ke provinsi. Nama usulan calon penerima bantuan akan di seleksi sesuai ketentuan yang ada pada pedoman pelaksanaan program. Nama nama penerima yang sesuai kemudian akan dibentuk kelompok kelompok kecil untuk mempermudah koordinasi pelaksana program.

Dibentuknya program ini dengan tujuan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni pada lingkungan sehat, aman, harmonis, serta berkelanjutan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan yang sehat dan layak

huni masih jauh daripada harapan, maka pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah secara terus menerus melaksanakan BSPTS agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengertian masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni

Dengan adanya permasalahan permasalahan di atas saya sebagai putra daerah tertarik mengangkat ini sebagai penelitian saya dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA PAKKAT, KECAMATAN PAKKAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah

1. “Bagaimana Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Pakkat Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung program pengimplementasian program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Pakkat, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

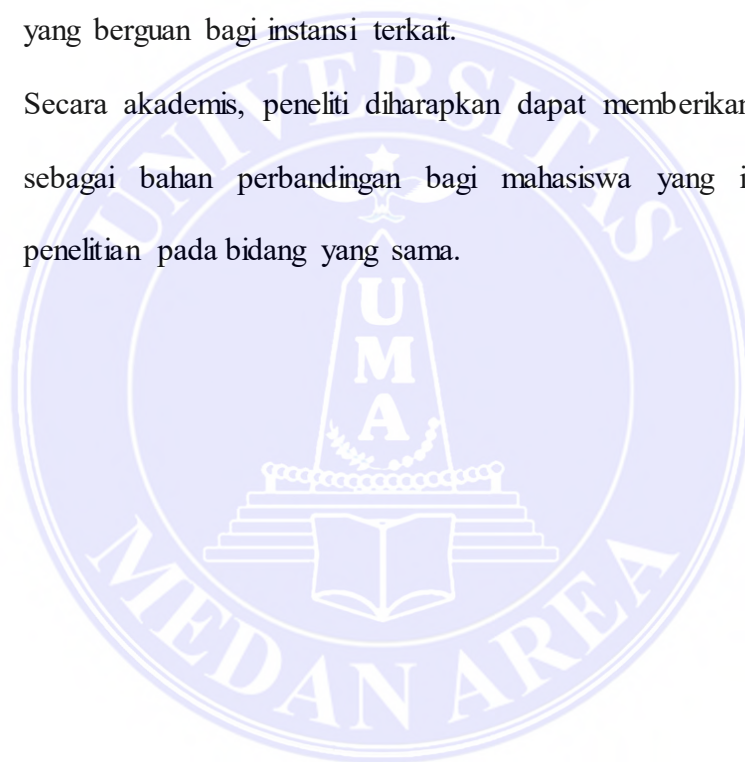
1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Deasa Pakkat
2. Untuk mengetahui masalah apa yang menjadi penghambat dalam

pembangunan rumah tidak layak huni

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. secara teoritis, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan yang berguan bagi instansi terkait.
3. Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Dye dalam Indiahono (2009:17) mendefinisikan kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Interpretasi kebijakan dari kebijakan menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tahapan dalam kebijakan publik itu sendiri adalah penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan, serta muncullah kebijakan baru.

Sehubungan dengan itu Lasswell (Nugroho, 2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (Thoha, 2002:62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut

Menurut Keban (2004:55) bahwa “Public Policy” dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan
2. . Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Anderson dalam Budi Winarno (2002:15) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Woll (1966) dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2003:2) dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini

menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

Jadi pada dasarnya, studi kebijakan publik berorientasi pada penyelesaian masalah nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini, kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan fokus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan kebijakan ialah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dengan cepat dan tepat.

2.2. Implementasi kebijakan

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus dapat diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:101) tahap implementasi kebijakan tidak mudah untuk dijalankan, dimana dalam tahap ini sering timbul penyimpangan-penyimpangan dari hal yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah-masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Hasilnya berupa 'produk' yang merupakan materialisasi dari visi.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Nugroho (2014:665), mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh

macam-macam tujuan yang akan dicapai oleh cara tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan di dalam proses kebijakan, karena melalui tahap ini, keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian yang maksimal yang diharapkan bagi semua implementor yang terlibat di dalamnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat salah satu program pemerintah, yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai upaya meningkat kualitas Rumah Layak Huni di desa Pakkat Hauagong.

2.3. Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.

Metter dan Horn (1975) (dalam Subarsono 2005:99) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur ke dalam masalah.

A. Model Van Mater dan Van Horn (1975)

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn, model ini menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan (Subarsono, 2005 : 19). Variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Mengukur kerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang

diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam

organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut

pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni menolak atau mendukung, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

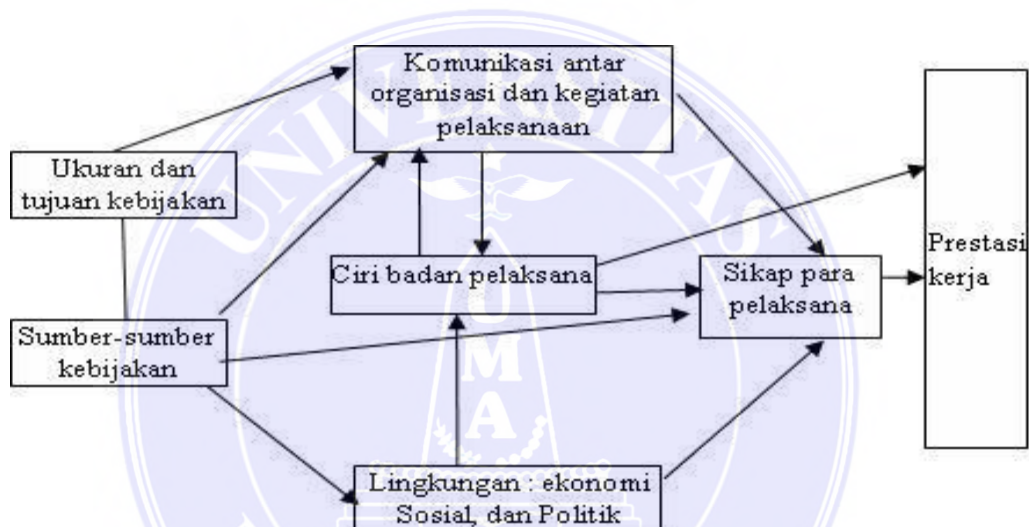
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yaitu: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Bagan 1.1: Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: subarsono (2005:100)

B. Model Merilee S Grindle (1980)

Marilee S Grindle, 1980 (Samodra Wibawa : 22), memberi pemahaman bahwa studi implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Grindle juga menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Keunikan model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan khususnya yang menyangkut implementor, penerima

implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi serta sumber daya yang akan diperlukan selama proses implementasi. Secara konsep dijelaskan bahwa model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Grindle menentukan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dilibatkan

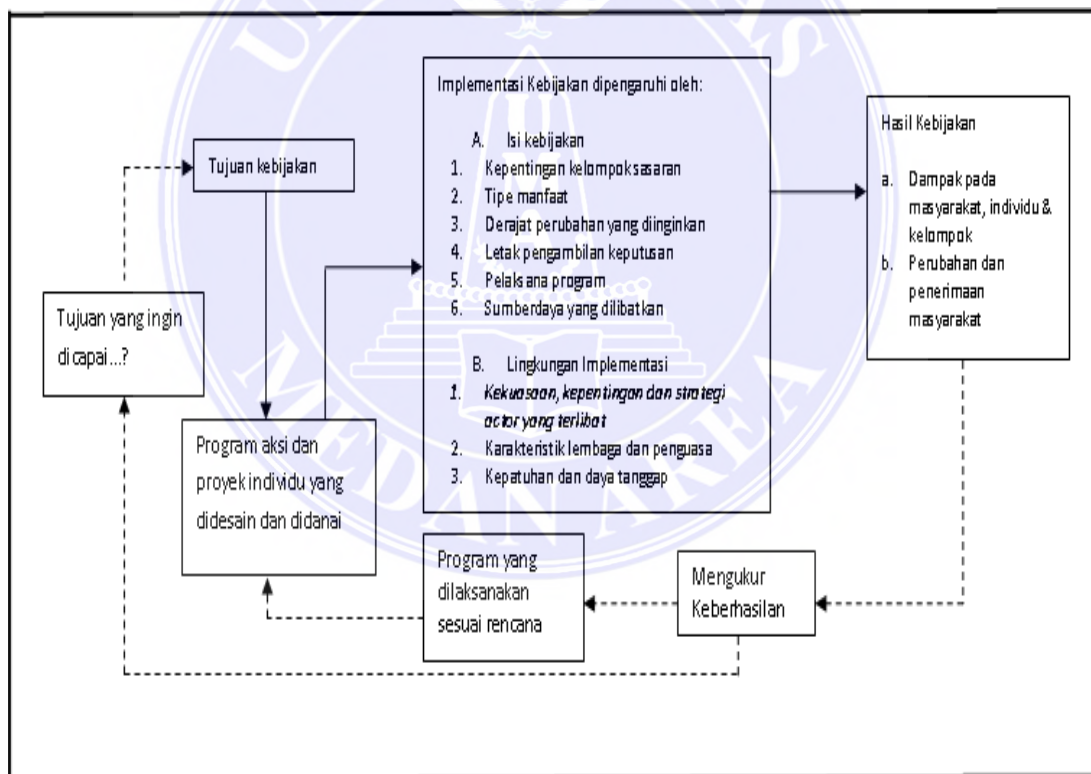
Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan keputusan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan sejumlah kecil unit pengambilan kebijakan. Selanjutnya pengaruh dalam konteks lingkungan yang terdiri dari:

1. Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Model implementasi kebijakan oleh Grindle memiliki hubungan dengan model implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana seluruh implementor dan agen-agen kebijakan harus mengetahui isi kebijakan terlebih dahulu sebelum mengimplementasikannya. Implementasi akan

berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Dengan bantuan faktor-faktor lain seperti sumber daya, disposisi atau sikap implementor, koordinasi dan komunikasi maka kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan yang hendak dicapai.

Bagan 1.2: Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle (1980)



Sumber : Subarsono (2005 : 94)

2.4. Kebijakan Pembangunan Perumahan Untuk MBR

Kebanyakan orang, di banyak negara dan sebagian besar manusia telah mampu menyediakan perumahan bagi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa perumahan lebih dapat diterima oleh pengambilan keputusan individual daripada apa yang disebut dengan 'kesejahteraan'. Alasannya jelas: kebutuhan perumahan kita bersifat permanen, karena kita selalu membutuhkan perumahan (King, 2003).

Tidak seperti kebutuhan kita untuk kesehatan, ini tidak bergantung pada keadaan. Yang berbeda tentu saja apakah kebutuhan perumahan kita saat ini terpenuhi. Tetapi karena kebutuhan kita bersifat permanen, hal itu dapat diprediksi, memungkinkan pola penyediaan yang lebih teratur dan konsisten. Oleh karena itu, perumahan sebagai komoditas dan aktivitas lebih mudah dipahami karena kita tahu bahwa kita memerlukannya, bahwa kita akan selalu membutuhkannya dan sesuai standar yang kita perlukan (King, 2003). Ini berarti perumahan bagi mereka yang berpenghasilan reguler, dapat dengan aman diserahkan ke pengambilan keputusan.

Nicholson dalam Turner (1982:106) mengartikan bahwa proses penyediaan perumahan perlu adanya keleluasaan bagi masyarakat (penghuni) baik menyangkut perangkat lunak (prosedur, peraturan), maupun perangkat keras (unit hunian, sarana dan prasarana). Salah satu perilaku yang dimiliki manusia adalah keberadaan manusia dalam lingkungan yang tidak bisa dikendalikan yang mengakibatkan keterasingan serta mahal biaya pembenahan (Turner, 1982:107). Perilaku tersebut juga mempengaruhi proses peruntukan perumahan bagi manusia. Kesalahan dalam mengantisipasi perilaku tersebut dan ketidaksesuaian dalam sistem penyediaan perumahan mengakibatkan tenaga dan dana lebih banyak terbuang dan masa pakai rumah menjadi lebih pendek. Sistem tersebut baiknya

disusun atas perpaduan perilaku, sumber daya, dan keinginan masyarakat (perumahan).

Dalam hal ini, Turner mengelompokkan sistem ini kedalam sektor populer dimana pemerintah harus memberi keleluasaan (otonomi) bagi sektor ini untuk dapat berkembang dan menyediakan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sektor ini mengelola sistem perumahan yang secara lokal swakelola atau otonom, dimana peran masyarakat sangat besar dalam merencanakan, membangun dan mengatur jalannya penyediaan perumahan.

Penyediaan perumahan, terutama rumah sederhana juga harus memperhatikan segi kemanusiaan (sosial psikologi, kepastian pribadi, kesadaran, kemasyarakatan dan ekonomi para penghuni), menurut Turner, penghuni dapat diajak berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan dan tatalaksana proyek bagian kotanya. Dengan begitu mereka mempengaruhi dan menciptakan dasar-dasar untuk suatu hidup kemasyarakatan yang individual dan tentram.

Ide Turner tentang perumahan dan perencanaan dapat dikaitkan melalui konsep tentang apa yang disebut “effective choice” yakni pilihan efektif. Hal ini dapat dilihat sebagai kemampuan untuk menentukan tujuan dan memiliki akses atas sumber daya yang dibutuhkan. Ada tiga prinsip yang digunakan dalam proses perumahan berdasarkan pilihan yang efektif. Prinsip pertama melibatkan pembatasan peran dan skala kegiatan pemerintah di perumahan. Pemerintah pusat tidak perlu menetapkan tindakan yang berbeda, namun seharusnya hanya menetapkan batasan atau parameter di mana lembaga dan individu dapat beroperasi. Kedua, kontrol proses perumahan harus bersifat lokal dan di tangandengan orang-orang yang menggunakan hasil dari proses tersebut. Ketiga, kontrol diaktifkan

dengan akses ke sumber daya. Ini adalah fungsi pendapatan, tapi juga berkaitan dengan syarat-syarat seperti fasilitasi sumber daya dan sarana untuk mengaksesnya

Menurut Ettinger dalam Panudju (2009:29), kriteria perumahan sebaiknya memenuhi standar yang baik ditinjau dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi kesehatan dan keamanan dapat melindungi penghuninya dari cuaca hujan, kelembapan dan kebisingan, mempunyai ventilasi yang cukup, sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah serta dilengkapi dengan prasarana air, listrik, dan sanitasi yang cukup.
- b. Mempunyai cukup ruangan untuk berbagai kegiatan di dalam rumah dengan privasi yang tinggi.
- c. Mempunyai cukup akses pada tetangga, fasilitas kesehatan, pendidikan, rekreasi, agama, perbelanjaan dan lain sebagainya

2.4.1. Subsidi Perumahan

Subsidi perumahan merupakan suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi selisih bunga, penambahan dana pembangunan, memperbaiki rumah.

Perumahan rakyat bisa jadi bentuk kepemilikan rumah dimana properti dimiliki oleh otoritas pemerintah, yang mungkin bersifat pusat atau lokal. Perumahan sosial adalah istilah umum yang mengacu pada perumahan sewa yang mungkin dimiliki dan dikelola oleh negara, oleh organisasi nirlaba, atau oleh

kombinasi keduanya, biasanya dengan tujuan menyediakan perumahan yang terjangkau. Perumahan sosial juga bisa dilihat sebagai obat potensial untuk ketidaksetaraan perumahan.

Ada beberapa hal yang dapat dilihat dalam kaitan antara subsidi dengan pembangunan perumahan. Pertama, ada masalah kemampuan. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, dan dengan cara apa kita bergantung pada orang lain, apakah itu negara atau agensi lain? Kedua, kita perlu menghargai masalah pengendalian, karena yang penting adalah siapa yang memiliki kekuatan atas sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan perumahan berkualitas. Ini adalah pemahaman kedua isu yang menjadi jantung penyediaan perumahan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Ada anggapan bahwa orang miskin tidak mampu, bahwa mereka tidak memiliki aset sendiri dan tidak dapat bernegosiasi melalui kompleksitas lingkungan perkotaan modern. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh de Soto (2000) dalam Turner (1976), masalah bagi masyarakat miskin seringkali bukan kekurangan sumber daya namun kemampuan untuk menggunakan dan mengintegrasikan aset mereka ke dalam arus utama perekonomian.

Wawasan ini menunjukkan peran yang seharusnya dimainkan pemerintah di perumahan: alih-alih pemerintah yang berusaha menyediakan perumahan itu sendiri, ia harus berperan sebagai fasilitator. Bisamenyediakan sumber daya, menerapkan kerangka kerja umum dan memastikan bahwa kontrak dapat dilaksanakan dan dilindungi.

Di Negara maju rumah-rumah bersubsidi cenderung telah ditinggalkan oleh penduduknya. Hal ini disebabkan karena mereka dapat membeli rumah nonsubsidi

dan memberikan rumah bersubsidi tersebut kepada masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Sebagai contoh dari Negara maju yakni keberhasilan Negara Singapura dan Arab Saudi mengenai perumahan yang disebabkan sejumlah faktor. Pertumbuhan ekonomi Singapura berdampak pada berkurangnya ketergantungan penduduk pada pemerintah dan menurunnya pertumbuhan penduduk. Hal ini memungkinkan pemerintah meningkatkan dana bagi penyediaan rumah bagi penduduk miskin. Selain itu tidak seperti Negara lainnya, lahan di Singapura dimiliki pemerintah, sehingga pemerintah tidak perlu menyediakan dana pembelian lahan. Sementara di Arab Saudi pendapatan Negara yang sangat besar memungkinkan pemerintah menyediakan rumah bagi setiap penduduk.

2.4.2. Perumahan Swadaya

Konsep perumahan swadaya dari sudut pandang perumahan penduduk berpendapatan rendah, diartikan sebagai kegiatan kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah melalui sumber daya sendiri baik berupa tenaga kerja dan keuangan (Zhang, Zhao dan Tian, 2003).

Sementara Dewar (1981) dalam Ntema (2011) menekankan hal yang sedikit berbeda, dengan menyatakan bahwa perumahan swadaya adalah sebuah proses pembangunan rumah yang individu dan komunitas memegang kendali terhadap keputusan tentang rumah dan lingkungannya, tanpa perlu membangunnya sendiri. Untuk definisi ini, perumahan swadaya didefinisikan sebagai proses pembangunan perumahan yang memungkinkan penduduk miskin bertindak sebagai pengambil keputusan pada tahapan perencanaan, desain, pengelolaan dan implementasi sementara pemerintah hanya menyediakan dana awal, pelatihan dan pengawasan selama pelaksanaan proyek.

Rumah swadaya dapat dikembangkan melalui rumah swadaya gotong royong (mutual self-help) dan pemerintah bersama LSM dapat mendukung dengan memberi insentif berupa bantuan teknis. Sebagai hasilnya, perumahan swadaya dapat menjadi cara meningkatkan taraf hidup

2.5. Standar rumah layak huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan Habitat for Humanity Indonesia, terdapat 3 poin penting yang harus kita ketahui dan terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dikatakan sebagai rumah layak huni.

1. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Poin pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu syarat rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan yang terdiri dari struktur bawah bangunan atau pondasi, struktur tengah bangunan atau ring balk, serta struktur atas bangunan atau atap. Keselamatan bangunan dapat tercapai jika kita menerapkan standar kualitas dan kompetensi bangunan yang tertuang dalam sertifikasi dan standarisasi. Dengan penerapan standar tersebut, peluang terjadinya kegagalan bangunan bisa terminimalisir.

2. Menjamin Kesehatan Bagi Para Penghuninya

Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, poin penting kedua yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rumah layak huni yaitu bangunan harus menjamin kesehatan para penghuninya dapat kita capai dengan standar pencahayaan, penghawaan dan fasilitas sanitasi bangunan.

3. Memenuhi Kecukupan Luas Minimum

Poin penting terakhir yang harus kita terapkan untuk membangun sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas minimum bangunan. Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

BSPS memiliki tiga kriteria bantuan obyek yakni peningkatan kualitas (PK), pembangunan baru (PB), dan pembangunan PSU. Untuk PK, RTLH menjadi sasaran program BSPS dan yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah RTLH dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Untuk PK, RTLH menjadi sasaran program BSPS dan yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah RTLH dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan atau kesehatan penghuni. Setidaknya ada sembilan kriteria ketidaklayakan sebuah rumah. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah luas lantai per kapitanya kurang dari 7,2 meter persegi, dan jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya. Kemudian jenis dinding rumah terbuat dari bambu, lantainya tanah, tak memiliki akses ke sanitasi layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tak ada akses ke air minum layak.

2.6. Keswadayaan Masyarakat

Teori selanjutnya adalah keswadayaan masyarakat. Keswadayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam memutuskan apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya dan apa yang akan dilakukan untuk masa depannya

(Soetomo, 2012:32). Terdapat beberapa unsur keswadayaan masyarakat. Pertama, kebutuhan bersama, dapat dilihat dari adanya visi yang ideal dan abstrak diturunkan ke dalam formulasi yang lebih operasional. Dalam proses tersebut dibutuhkan kesadaran masyarakat dan partisipasi lokal. Kesadaran meliputi kesadaran akan kondisi yang diharapkan, kesadaran akan kondisi kehidupan saat ini, serta kesadaran akan adanya kesenjangan di antara keduanya. Sedangkan partisipasi lokal dibutuhkan dalam mengumpulkan dan konsolidasi dukungan masyarakat serta mempermudah implementasi, memelihara kesinambungan kegiatan, pengembangan atau perluasan kegiatan. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk lebih inisiatif, mengurangi apatis dan rasa putus asa dalam menghadapi permasalahan.

Kedua, adanya potensi dan sumber daya lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga upaya yang mengubah sumber daya yang laten menjadi manifes. Pertama, identifikasi kebutuhan masyarakat secara terus menerus sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Kedua, identifikasi potensi, sumber daya dan peluang yang juga selalu berkembang. Identifikasi ini harus mampu meliputi keseluruhan potensi dan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial. Ketiga, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Masyarakat memiliki sumber daya yang terbatas sehingga perlu pemanfaatan yang efisien dan maksimal sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang pada akhirnya mengapresiasi kemampuan mereka sendiri. Masyarakat harus mampu memilah mana sumber daya yang mampu mendukung pencapaian jangka pendek dan mana yang mampu

mendukung pencapaian jangka panjang. Pemanfaatan dengan cara tersebut akan memungkinkan masyarakat menggunakan cara yang sama dalam memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pihak eksternal.

Ketiga, pengetahuan dan kearifan masyarakat yang terbentuk dari proses interaksi antarwarga masyarakat dan interaksi terhadap lingkungannya. Dalam proses tersebut terjadi tindakan yang bersifat adaptif dan inovatif. Terdapat pula proses bekerja sambil belajar dimana kemampuan dan kreativitas masyarakat terakumulasi dari proses saling bertukarnya pengetahuan, keahlian, dan aset material yang dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Pengetahuan dan kearifan lokal selalu berkembang baik secara kumulatif maupun verifikatif. Kumulatif artinya pengetahuan masyarakat dapat berkembang semakin luas dan semakin banyak sejalan dengan pengalaman yang semakin bertambah. Verifikatif artinya melalui pengalaman dalam implementasi pengetahuan dan pengalaman lokal yang dimiliki, masyarakat dapat belajar tentang kekurangan dan kelebihan yang kemudian dijadikan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan.

Keempat, keberadaan institusi sosial yang dapat dilihat dari proses bekerja sambil belajar dalam kehidupan keseharian yang sudah menjadi rutinitas yang kemudian menghasilkan aktivitas bersama yang terpola. Kehadiran institusi sosial merupakan manifestasi kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan kegiatan bersama. Institusi sosial merupakan media partisipasi masyarakat, perumusan perencanaan lokal, memberikan pelayanan, mobilisasi sumber daya lokal, sarana identifikasi kebutuhan lokal, dan sarana peningkatan kesadaran dan komitmen untuk tindakan bersama dalam rangka mewujudkan visi bersama.

2.7. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau “*village*” diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 BAB I Ketentuan Umum Pasal (1) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja 2003:3). Menurut Nurcholis dalam bukunya yang berjudul “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ”menyebutkan bahwa desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Menurut P.J. Bournen dalam Nurcholis desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling

mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial. Menurut R.H. Unang Soenardjo masih dalam Nurcholis menyebutkan desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan ekonomi, politik, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan beberapa penjelasan defenisi-defenisi diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan peneliti ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti melakukan hasil-hasil peneliti terdahulu sebagai berikut.

Hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Hasil yang dilaksanakan oleh Muhammad Maksun dengan judul Analisis Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012). Hasil penelitian tersebut Rendahnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan desa rumah layak huni berakibat pada terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan rumah layak huni tidak berjalan secara optimal. Penelitian ini cenderung mengulas tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
2. Hasil yang dilaksanakan oleh Afifa Qomaria dengan judul Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. (Jurnal, 2015). Hasil penelitian tersebut ialah Program BSPS memberikan perubahan dan dampak yang cukup baik. Program BSPS meningkatkan kualitas tempat tinggal warga dan meningkatkan kesejahteraan. Meski demikian masyarakat mengeluh mengenai dana bantuan yang mereka terima.

Mereka merasa keberatan dengan jumlah dana yang sedikit. Dapat dikatakan program BPSPS cukup efektif untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Penelitian ini cenderung mengulas Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto.

3. Selanjutnya dilaksanakan oleh Zulkarnain dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan. (Jurnal, 2017) hasil peneliti ialah Implementasi Kebijakan BPSPS di Kabupaten Parigi Selatan tidak maksimal, karena ada tiga aspek yang tidak terpenuhi yaitu komunikasi antar lembaga dan antar pelaksanaan, karakteristik lembaga pelaksana dan kecenderungan pelaksana. Penelitian ini cenderung mengulas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
4. Hasil yang dilaksanakan oleh Isabella yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014) (Jurnal, 2017). Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan Program BPSPS di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014 telah membantu 50 KK di desa ini dengan cara meningkatkan kualitas rumah. Program ini dikatakan berhasil karena sudah berlangsung dan mendapatkan apresiasi dari penerima bantuan.

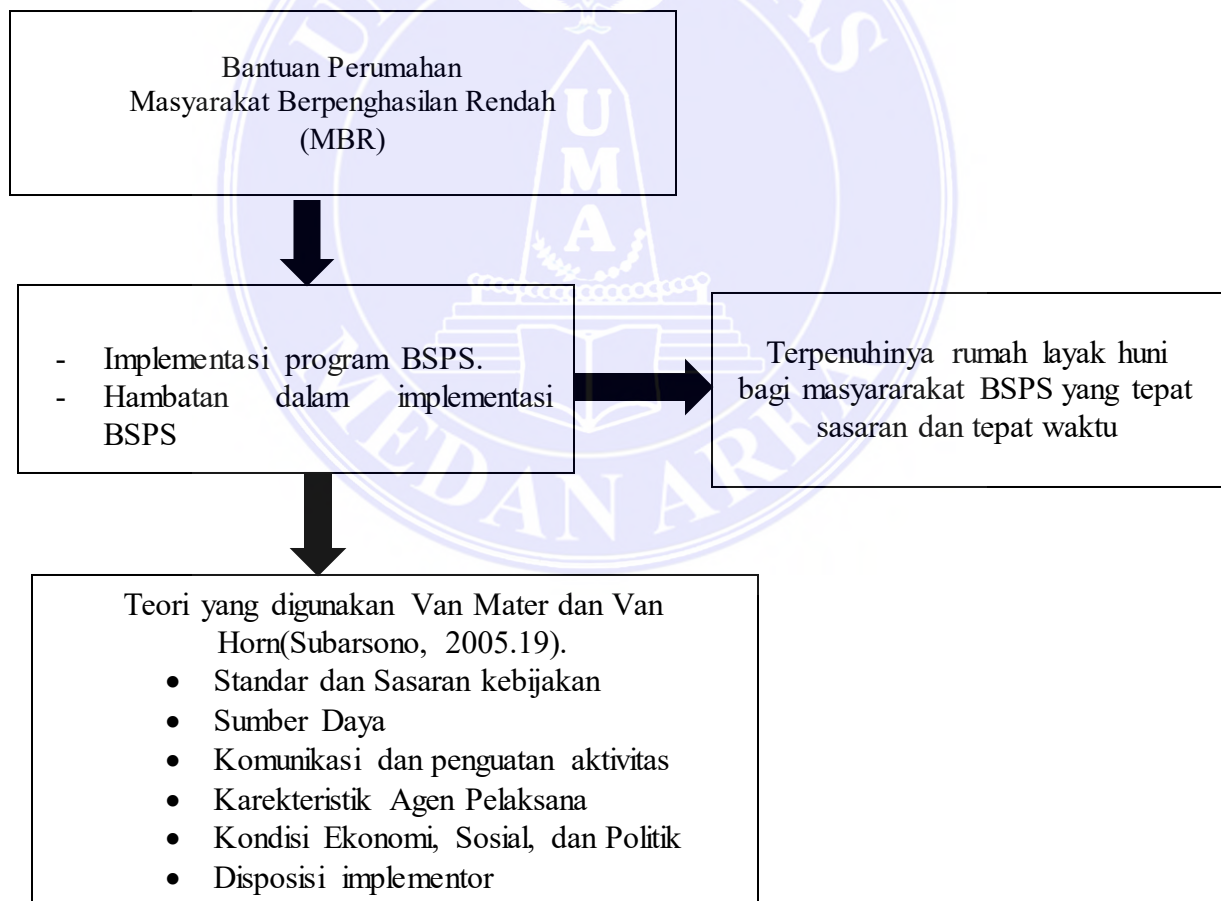
Berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang sebelumnya tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Pakkat, Kecamatan

Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi BSPS di Desa Pakkat dan apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan BSPS

2.9. Kerangka Pemikiran

Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini ad



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Dengan demikian bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh informasi terkait dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data tentang proses implementasi pelaksanaan program bantuan perumahan swadaya di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mencari informasi terkait proses pengimplementasian kebijakan PBPS, yang mana apakah para implementor telah mengetahui bagaimana standard dan sasaran kebijakan yang seharusnya, agar dapat mencapai hasil kebijakan itu sendiri. Selain itu penulis juga akan mengobservasi terkait komunikasi dan sikap antar implementor yang mana untuk mencapai sasaran kebijakan, sikap dan koordinasi atau kerjasama antar implementor sangat dibutuhkan agar implementor dapat mengoptimalkan sumber daya, potensi untuk mencapai kesejahteraan desa dan memiliki rumah layak huni

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakkat, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan rumusan masalah dan mendapatkan data yang tepat untuk dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan oleh peneliti

Tabel 1. waktu kegiatan

NO	Kegiatan	WAKTU PELAKSANAAN															
		TAHUN 2021								TAHUN 2022							
		4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyusunan Proposal	■	■														
2	Seminar Proposal			■													
3	Perbaikan Proposal				■	■											
4	Pengambilan Data riset							■									
5	Pengelolaan Data riset								■	■							
6	Bimbingan seminar hasil											■	■	■	■	■	

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020-2023.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi serta bahan-bahan lainnya untuk mendukung dalam menyelesaikan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer adalah teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan yang dilakukan secara:
 - a. Wawancara adalah cara pengumpulan data melalui wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam berdasarkan pedoman wawancara.
 - b. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti di lokasi objek penelitian berdasarkan pedoman observasi.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti buku, majalah, jurnal, dan laporan penelitian serta lainnya yang dapat mendukung. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:
 - a. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumentasi yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian berdasarkan pedoman dokumentasi.
 - b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para

ahli yang berkompetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.4 Informan Penelitian

Informasi dan data merupakan faktor yang sangat penting untuk menjalankan sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan penelitian merupakan sumber utama untuk mendapatkan data deskriptif yang akan diolah nantinya untuk menarik kesimpulan. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang dibahas maka penulis menggunakan teknik informan. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini ada dua jenis informan penelitian yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini merupakan Kepala Desa Pakkat Hauagong Bapak Murdin Tinambunan
2. Informan utama dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang merasakan dampak langsung seperti Ibu Riani Marbun, Japar Sihotang dan Bapak Charles Manalu
3. Informan Pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat, Tokoh tokoh masyarakat selaku penghuni desa Pakkat Hauagong. Seperti Hendra sebagai sekretaris desa Arnol sinaga, Darul sitohang, Jefris Marbun

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga

bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.



rumah layak huni di Desa Pakkat Hauagong, Kec Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan

5.1 Kesimpulan

Untuk melihat Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam penyediaan rumah layak huni di Desa Pakkat, Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Pakkat Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan sudah diterapkan dan dilaksanakan berdasarkan SOP yang sudah ditentukan, yang dimana terdapat syarat-syarat yang diminta agar masyarakat dinyatakan masuk seleksi dalam pendataan penerimaan program BSPS. Program BSPS juga sudah dapat dikatakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal rumah layak huni dalam kelas social ekonomi menengah kebawah.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung program pengimplementasian program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Pakkat, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang menjadi factor penghambat dari program pengimplementasian program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Pakkat, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah terdapat kesulitan dalam hal pendataan masyarakat di Desa Pakkat dikarenakan mata pencaharian lebih dominan sebagai petani yang mengelola sawah dan ladang. Selain itu juga banyak didapati masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses pembangunan rumah bantuan tersebut sehingga menghambat proses menjadi lebih lama. Yang menjadi factor pendukung dari Program BSPS tersebut adalah keaktifan respon dari

pihak donator program BSPS yang mengakibatkan proses transaksi antara masyarakat yang berkaitan. Selain itu, cepat tanggap dalam mengatasi masalah-masalah yang didapati di lingkungan Desa Pakkat Huarang.

5.2. SARAN

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah layak huni di Kecamatan Pakkat, Desa Pakkat adalah:

- A. Perlu dilakukan Sosialisasi lebih kepada masyarakat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini, agar kesalahan kesalahan dalam pembangunan tidak terjadi
- B. Harus ada peningkatan anggaran bantuan tiap tahunnya, mengingat banyaknya masyarakat yang mempunyai rumah yang kurang layak huni, agar pemerataan bantuan di tiap desa dapat tercapai
- C. Kordinasi dan Komunikasi antara dinas perumahan, fasilitator dan masyarakat lebih terbuka agar tidak adanya miss komunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Panudju, Bambang. 2009. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung : PT Alumni
- Sastra, Suparno M, Endy Marlina. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta : Andi Offset.

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maznania, Daniel A and Paul A. Sabatler.1983 *Implementation and Publik Policy*,scott Foresman and.Company,USA
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan, Drs, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003
- Jones, charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Purwanto, agus erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*.Yogyakarta: Gava Media.
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik “Konsep dan Aplikasinya”*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Prasindo.
- Soetomo, 2012. *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- **Jurnal**

Nuraida Mailasari. 2017.*Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP* Vol. 4 No. 2-Oktober 2017

Isabella, Julio Sesar, Amaliatulwalidain. 2017. *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014)*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* Volume 2 No.1 Januari 2017

Ika Narwidya, Sri Susilih. 2013. *Keswadayaan Masyarakat dalam Pengembangan RW Layak Anak (Studi pada Masyarakat RW 06, Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*

Peter King. 2008. *Housing for the poor : the role of government*. Journal compilation © Institute of Economic Affairs 2008.

- **Undang undang**

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M/2016 *Tentang bantuan program bedah rumah*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Pemukiman*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M/2015



LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kantor Kepala Desa



Sumber: Foto Penulis (2021)

Lampiran 2 Foto bersama Kepala desa Pakkat Hauagong



Sumber: Foto Penulis (2021)

Lampiran 3 Foto bersama sekretaris Desa



Sumber: Foto Penulis (2021)

Lampiran 4 Foto Bersama dengan perangkat Desa



Sumber: Foto Penulis (2021)

Lampiran 5 Foto bersama Penanggung jawab Bantuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/1/24

70

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/24



Sumber: Foto Penulis (2021)

Lampiran 6 Foto bersama masyarakat yang menerima bantuan



Sumber Foto Penulis (2021)

Lampiran 7 Foto Rumah Bantuan Rumah Yang Telah Selesai





Sumber: Foto Penulis (2021)

Lampiran 8

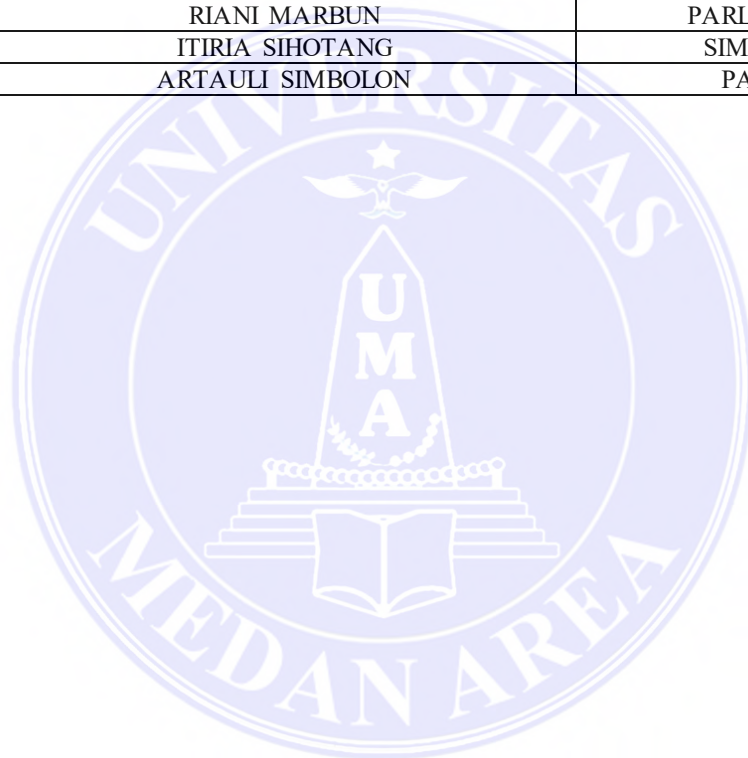
Hasil Observasi Penelitian Data Nama-Nama peneriman yang di usulkan menerima BSPS.

No	NAMA	ALAMAT
1	Melka Simamora	SIMARSIK
2	Japar Sihotang	SOSORGADONG
3	Leonilia Simatupang	SOSORGADONG
4	Charels Manalu	SOSORGADONG
5	Rostiana Simanullang	PARLUASAN
6	Jasner Simanullang	SIOURUOR
7	Raja Hormat Manalu	SOSORGADONG
8	Viktor Silaban	PASAR
9	Pariston Sihite	PASAR
10	Sentiar Simaremare	SOSORGADONG
11	Parlindungan Simbolon	SIMARSIK
12	Hanggohan Tinambunan	SIMARSIK
13	Antonius Sihotang	SIMARSIK
14	Lina situmeang	SOSORGADONG
15	Roni Pasla Simanullang	PARLUASAN
16	Riani Marbun	PARLUASAN
17	Itaria Sihotang	SIMARSIK
18	Artauli Simbolon	PASAR

Lampiran 9

Lembar Observasi Penelitian Data Penerima BSPS.

No	NAMA	ALAMAT
1	JAPAR SHOTANG	SOSORGADONG
2	LEONILIA SIMATUPANG	SOSORGADONG
3	CHARLES MANALU	SOSORGADONG
4	JASNER MANULLANG	SIURUOR
5	SENTIAR SIMAREMARE	SOSORGADONG
6	PARLINDUNGAN SIMBOLON	SIMARSIK
7	VIKTOR SILABAN	PASAR
8	HANGOGOHAN TINAMBUNAN	SIMARSIK
9	ANTONIUS SIHOTANG	SIMARSIK
10	LINA SITUMEANG	SOSORGADONG
11	RONI PASA SIMANULLANG	PARLUASAN
12	RIANI MARBUN	PARLUASAN
13	ITIRIA SIHOTANG	SIMARSIK
14	ARTAULI SIMBOLON	PASAR



Lampiran 10

Waktu Pelaksanaan Observasi dan Penelitian

NO	Kegiatan	WAKTU PELAKSANAAN															
		TAHUN 2021								TAHUN 2022							
		4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyusunan Proposal	■	■														
2	Seminar Proposal			■													
3	Perbaikan Proposal			■	■	■											
4	Pengambilan Data riset							■									
5	Pengelolaan Data riset								■	■							
6	Bimbingan seminar hasil											■	■	■	■	■	

Lampiran 11

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI DESA PAKKAT, KECAMATAN PAKKAT,
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTA, PROVINSI SUMATERA
UTARA**

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati keadaan pemerintah desa dalam kebijakan BSPS yang dilakukan oleh Pemerintah desa:

A. Tujuan :

Untuk memproleh informasi dan data mengenai kebijak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

B. Aspek yang diamati :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Alamat/lokasi Penelitian di Kantor desa	✓		Desa Pakkat Hauagong, Pasar Pakkat.
	Lingkungan sekitar kantor desa Pakkat Hauagong	✓		Lingkungan yang baik dan kondisi geografis yang baik
3	Kondisi Fasilitas/unit perumahan di sekitar kantor desa Pakkat Hauagong.	✓		Kondisi perumahan yang memadai dan layak huni
4	Proses kegiatan apa saja yang adadi sekitar kantor desa Pakkat Hauagong. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).	✓		1. Sosialilasi 2. Pendataan 3. Seleksi 4. Penentuan

Lampiran 12
Pedoman Wawancara

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI DESA PAKKAT, KECAMATAN PAKKAT,
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTA, PROVINSI SUMATERA
UTARA**

Kepala Desa

Kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi sangat diharapkan dalam skripsi ini, karena itu peneliti hanya mengajukan garis besar rencana wawancara yang akan diperdalam saat melakukan wawancara dengan informan.

- A. Tujuan :
Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)..
- B. Pertanyaan panduan :
- a. Identitas diri
 - 1) Nama : Murdin Tinambunan
 - 2) Jabatan : Kepala Desa
 - 3) Agama : Khatolik
 - 4) Jenis kelamin : Laki-Laki
 - 5) Pekerjaan : Kepala Desa
 - 6) Alamat : Pakkat Hauagong
 - 7) Pendidikan terakhir : SMA Sederajat
 - b. Pertanyaan penelitian
 - 1) Bagaimana menurut penerima bantuan mengenai kebijakan pemerintah BSPS?
 - 2) Bagaimana kesesuaian antara jumlah bantuan yang diterima pada dana pembangunan rumah yang layak huni?
 - 3) Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor desa Pakkat Hauagong pada saat penyaluran bantuan BSPS kepada masyarakat?
 - 4) Apakah pelaksanaan kebijakan BSPS yang diberikan kepada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penanggungjawab Program BSPS

A. Tujuan :

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

B. Identitas :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) Nama | : Tian Simanungkalit |
| 2) Jabatan | : Sesi Kesejahteraan |
| Desa | : Pakkat Hauagong |
| 3) Agama | : Kristen |
| 4) Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5) Pekerjaan | : Perangkat Desa |
| 6) Alamat | : Pakkat Hauagong |
| 7) Pendidikan terakhir | : SMA |

2) Pertanyaan penelitian :

- 1) Sejauh mana dampak penyaluran program BSPS pada masyarakat?
- 2) Bagaimana sumber daya aparatur dikantor desa Pakkat Hauagong terhadap pelaksanaan penyaluran BSPS?
- 3) Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor desa Pakkat Hauagong pada saat penyaluran bantuan BSPS kepada masyarakat?
- 4) Apakah pelaksanaan kebijakan bantuan BSPS yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan desa?

Masyarakat Penerima Bantuan

Pertanyaan

1. Identitas Diri

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1) Nama | : Artauli Simbolon |
| 2) Jabatan | : Penduduk |
| 3) Agama | : Kristen |
| 4) Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5) Pekerjaan | : Petani |
| 6) Alamat | : Pakkat Hauagong |
| 7) Pendidikan terakhir | : SMA |

2. Pertanyaan Penelitian:

- 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan BPS pada masyarakat?
- 2) Bagaimana sumber daya aparatur kantor desa Pakkat Hauagong terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan BPS?
- 3) Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor desa Pakkat Hauagong pada saat penyaluran bantuan BPS kepada masyarakat?
- 4) Apakah pelaksanaan kebijakan bantuan BPS yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan desa?

Lampiran 13

Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama : Afi Anju Tribintang Sinurat
Tempat, Tanggal Lahir : Pangururan, 02 Agustus, 1999
Agama : Islam
Alamat : Pakkat

Nama Orang Tua

Ayah : Affandi Sinurat
Ibu : Tiodor Sitanggung

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Polisi
Ibu : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Desa Pakkat Hauagong, Kec. Pakkat, Kab.
Humbang Hasundutan

Riwayat Pendidikan : 2005-2011 – SD 173463
2011-2014 – SMP Negeri 1 Pakkat
2014-2017 – SMA Negeri 1 Pakkat
2017-2023 – Ilmu Pemerintahan S-1 Universitas
Medan Area (UMA)